BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan melahirkan adat istiadat yang merupakan buah dari kebudayaan. Pada perkembangannya, adat memiliki nilai yang tinggi dan sakral dalam kehidupan bersama. Mereka berusaha mempertahankan dan melestarikan adat istiadat dari intervensi pihak luar dan perubahan zaman. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa pelanggaran terhadap adat akan berdampak pada ketidak seimbangan dan kerusakan tatanan suatu masyarakat. Oleh karena kedudukan adat yang begitu kuat dalam masyarakat, maka hukum adat tidak boleh dikesampingkan dan terkadang menjadi pedoman dalam menyusun hukum positif pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. Bahkan terkadang kekuatan hukum adat yang notabene tidak tertulis lebih mengikat dan ditaati oleh masyarakat daripada hukum yang tertulis. Sehingga ada sebagian adat yang berkembang dalam masyarakat yang nampaknya bertentangan dengan hukum Islam tetap dipertahankan dan dilestarikan sampai sekarang. Dalam hukum Islam *fiqh* terbagi dua, yaitu *fiqh ibadah* dan *fiqh muamalah*.

Dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk meringankan beban saudaranya sesama muslim yakni bisa dengan tolong menolong dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat.”¹

Hadis yang agung menunjukkan besarnya keutamaan seorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, baik dengan bantuan harta, tenaga maupun pikiran atau nasehat untuk kebaikan.

An-Nawawi berkata: “Dalam hadits ini terdapat keutamaan menunaikan/membantu kebutuhan dan memberi manfaat kepada sesama muslim sesuai kemampuan, (baik itu) dengan ilmu, harta, pertolongan, pertimbangan tentang suatu kebaikan, nasehat dan lain-lain

Syariat Islam yang di bawa Nabi Muhammad Saw, selain mengatur hubungan manusia dengan khaliknya atau sering disebut ibadah, juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut *muamalah*. Dalam

¹ Abi Husein Muslim bin Hajjaj,,*Syarah Shahih Muslim*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2011), hlm. 254

penerapan sehari-hari hubungan antar manusia sebagai manifestasi muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan kaidah hukum Islam. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bagi hasil (mudharabah), urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah mudharabah (bagi hasil), berbagai aturan, dasar hukum, tata cara dan hukum dalam kerja sama diatur dalam Islam yaitu bagaimana berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.² Adapun yang menjadi dasar hukum dapat dijumpai dalam al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. al- Muzammil/73: 20.

وَأَخْرَجُوا يَظْرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Mudharabah merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pengelola menolong pemilik modal dan pemilik modal menolong pengelola agar mendapatkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mudharabah yang sah, ialah mudharabah yang terpenuhi seluruh rukunnya dan syaratnya atau

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2015), hlm.366

mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syara'. Mudharabah yang sah dapat juga dilarang dalam syari'at bila melanggar ketentuan pokok seperti menyakiti si pemilik modal, menipu, dan lain sebagainya.

Salah satu dari dampak sosial ekonomi mudharabah ialah mendapatkan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena, kalau tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam kemiskinan. Tetapi, orang miskin tersebut harus pandai bekerja agar keduanya saling bisa tukar menukar kepentingan. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.³

Seorang pekerja itu adalah pemikul amanat majikan (pemberi kerja), maka kewajibannya ialah menjalankan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya. Pekerja/pegawai mempunyai kewajiban dan hak. Haknya antara lain mendapatkan upah/gaji, menolak pekerjaan di luar perjanjian, mendapatkan jaminan, memiliki kepastian waktu, dan sebagainya. Adapun hak majikan atas pekerja antara lain meminta pertanggung jawabannya, memindah tugaskan, memberi peringatan, dan sebagainya.

Realita sekarang penulis menemukan kejanggalan pada praktik perkebunan karet dimasyarakat di Desa Wonorejo Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu. Penulis mendengar langsung tentang praktik tersebut. Pemilik perkebunan mengeluh karena si penyadap yang menyadapkan karetinya tidak menggunakan cara yang baik dalam cara menyadapnya dan perawatannya tanpa

³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 149

sepengetahuan pemiliknya dalam sebutan disana disebut “sosrok”, dengan disosrok maka hasil dari getahnya semakin banyak, tapi berdampak pada kerusakan pohon karet tersebut. Alasan pemilik mempekerjakan atau mengupah orang lain untuk menyadapkan karetnya dikarenakan usia pemilik yang sudah lanjut usia, dengan mempekerjakan orang lain untuk menyadapkan karetnya, maka ia tinggal menunggu hasil atau tiba waktu gajiannya setiap minggunya tanpa memperhatikan atau mengontrol cara orang yang dipekerjakan untuk menyadap di pohon karetnya.

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang praktik sosrok perkebunan karet tersebut ditinjau menurut hukum ekonomi Islam. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Praktik Sosrok Perkebunan Karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan masalah atau pokok masalah yang akan diteliti. Maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *sosrok* perkebunan karet di desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahui praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *sosrok* perkebunan karet di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

D. Definisi Operasional

1. Praktik adalah pelaksanaan; perbuatan melakukan (keyakinan dan sebagainya).⁴ Praktik yang dimaksud disini adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan penggarapan secara curang sehingga menghasilkan penghasilan yang lebih banyak.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 909

2. Perkebunan adalah perusahaan kebun; tanah-tanah kebun (karet dan sebagainya).⁵ Yang di maksud disini adalah hasil dari perkebunan karet tersebut.
3. Sosrok merupakan cara penyadapan yang di mulai dari arah tengah, kiri, atau kanan pohon dengan di sadap dari bawah ke arah atas. Dengan kedalaman sadapannya yang tidak teratur. Pohon karet yang biasa di sosrok yaitu yang kulitnya tinggi mendekati dahan cabang yang tinggi, melampaui dahan cabang yang tidak bisa di jangkau dengan tangan. Kecuali, menggunakan kayu panjang untuk menopang pisau sadap.⁶

E. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khusus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kajian Pustaka

⁵ *Ibid.*, hlm. 535

⁶ Hasil observasi pada tgl 31 oktober 2015 di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu

Dari hasil penelusuran penulis, penulis mengkaji dari hasil skripsi:

1. Harianti, NIM: 0201154119 yang berjudul: ***“Praktik bagi Hasil Pola Musaqoh dalam Pengelolaan Lahan Karet (Study Beberapa Kasus di Kabupaten Banjar).”*** Di dalam skripsinya ia meneliti dan menyoroti praktik musaqah pada pengelolaan lahan perkebunan karet sudah siap untuk di sadap getahnya sehingga petani penggarap hanya melakukan penyadapan, pembersihan dan pemupukan, bagi hasil pada praktik ini di dasarkan pada persentase tertentu, tetapi setelah di potong terlebih dahulu untuk beberapa macam biaya yang dikeluarkan.
2. Husnul Hatimah, NIM: 1001150135 yang berjudul: ***“Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”***. Di dalam skripsinya ia meneliti tentang perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap, seringkali terjadi perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak (baik pemilik ataupun penggarap) mengingkari perjanjian yang telah disepakati, misalnya pemilik meminta bagian untuknya melebihi persentase yang telah ditunjukan, jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Beberapa kajian terdahulu tentang praktik kerjasama dalam bidang tanaman tidak satupun yang menyentuh masalah praktik *sosrok* perkebunan karet.

Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada praktik *sosrok* perkebunan karet, dan dari segi tinjauan hukum ekonomi Islam, sehingga penelitian yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu, begitu juga dengan objek permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis data. Dalam bab ini berisi uraian mengenai ketentuan mudharabah (bagi hasil) yang terdiri dari pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun mudharabah, macam-macam dan sifatnya, syarat-syarat mudharabah, hukum mudharabah, hukum perselisihan antara pemilik modal dan mudharib, hal-hal yang membatalkan mudharabah.

Bab III: Metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV: penyajian data dan analisis

Bab V: penutup, yang memuat simpulan dan saran-saran.